

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Manajemen

Menurut Balderton mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.¹ Dimana dalam hal ini program-program yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga akan dapat terlaksana secara sempurna melalui penerapan peran manajemen.

Istilah *manajement*, berasal dari bahasa Perancis kuno, *manajement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan yang dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal. Adapun menurut James, manajemen adalah kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus dalam membentuk organisasi. Semua organisasi memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap organisasi dalam mencapai sasarannya. Orang ini disebut manajer. Para manajer lebih menonjol dalam beberapa organisasi daripada yang lain, tetapi tanpa manajemen yang efektif, kemungkinan besar organisasi akan gagal.²

¹ Rahardjo Adisasmitha, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 21.

² Undang Ahmad Kamludin, dan Muh. Alfian, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 27- 28.

1. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke- 20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. Akan tetapi saat ini, kelima fungsi tersebut diringkas menjadi empat fungsi yaitu:³

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah memikirkan apa yang dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan. Kemudian, melihat apakah rencana alternatif tersebut cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan dengan baik.⁴

Oleh karenanya perubahan yang hendak dilakukan agar sampai pada tujuan dengan efektif, harus direncanakan terlebih dahulu. Setidaknya ada upaya untuk membangun cita-cita ke depan dengan kapasitas yang dimiliki. Dengan demikian, langkah-

³Ibid.,32- 35.

⁴ Dr. Andriani, *Pengantar Manajemen*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2015), 49.

langkah yang hendak ditempuh tersusun rapi beserta langkah alternatif yang disediakan. Kebiasaan untuk menyusun rencana merupakan sikap positif untuk menuju perubahan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Jadi pengorganisasian ini akan menetapkan suatu sistem organisasi yang akan dianut oleh organisasi dalam mengadakan distribusi kerja untuk mempermudah perealisasi tujuan.⁵

Akan tetapi, bagi seorang muslim yang bertauhid ketika berorganisasi ia selalu mendasarkannya pada perintah Allah SWT bahwa sesungguhnya kaum muslim harus tetap bekerja sama.

c. Pengarahan (*directing*)

Pengarahan (*directing*) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi, *actuating* artinya orang-orang agar bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (*leadership*). Artinya, kepemimpinan seseorang akan dinilai berhasil apabila ia dapat menjaga dengan baik norma-norma agama dan masyarakat

⁵ Dr. H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 24.

secara sungguh-sungguh. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat mengarahkan anak buahnya pada kebaikan.⁶

d. Pengevaluasian (*evaluating*)

Pengevaluasian (*evaluating*) adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan, kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar.

Bagi orang beriman segala masalah selalu ada jalan keluarnya oleh karenanya seorang muslim dilarang untuk tenggelam dalam masalah, kemudian frustrasi dan patah arang. Orang beriman yang didasari oleh sikap tauhid akan menyelesaikan segala masalah dengan kesabaran, dan menyerahkan keputusannya kepada Allah SWT Maha Pencipta.

2. Prinsip Manajemen

Prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat lentur, dalam arti perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus serta situasi-situasi yang berubah. Menurut Henry Fayol, pencetus teori manajemen yang bersal dari perancis, prinsip-prinsip umum manajemen

ini terdiri atas :

- a. Pembagian kerja (*division of work*)
- b. Wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*)
- c. Disiplin (*discipline*)
- d. Kesatuan perintah (*unity of direction*)
- e. Mengutamakan kepentingan organisasi
- f. Penggajian pegawai
- g. Pemusatan (*centralization*)
- h. Hierarki (*tingkatan*)
- i. Ketertiban (*order*)
- j. Keadilan dan kejujuran
- k. Stabilitas kondisi karyawan

⁶ Undang Ahmad Kamludin, dan Muh. Alfian, *Etika Manajemen Islam*, 32- 35.

- l. Prakarsa (inisiatif)
- m. Semangat kesatuan, semangat korps.⁷

Islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus suatu sistem. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melakukan amalan. Pedoman tersebut adalah Al- Qur'an dan Sunnah Nabi. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam kegiatan kelembagaan baik berupa bisnis ataupun kegiatan sosial ekonomi yang menyangkut hubungan masyarakat banyak. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut dalam menjalankan suatu tatanan kehidupan tersebut, terutama tatanan kehidupan sosial ekonomi.

Dalam Islam juga disebutkan bahwasannya ada 2 hal yang perlu untuk diperhatikan oleh setiap manusia diantaranya :

- a. Akidah

Akidah mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai dampak yang kuat dalam cara berfikir seseorang. Akidah begitu kuat pengaruhnya sehingga dapat mengendalikan manusia agar mau mengikuti ajaran yang disembahnya.

- b. Moral

Moral menunjukkan kepada perilaku manusia tentang hukum yang berlaku pada manusia itu sendiri. Hukum yang berlaku pada manusia berbeda dengan hukum formal. Pada hukum formal

⁷Ibid.,36.

memberi sanksi jika melanggar. Akan tetapi, hukum formal tidak tetap menembus ke dalam sehingga melihat hal yang bersifat niatnya saja. Misalnya dalam kasus orang yang bersedekah, hukum moral memandang niat dari sedekah ini. Jika niatnya baik demi menolong orang yang lemah maka sedekah ini baik dan berarti pula sama persis dengan nilai moral. Tapi jika niatnya jelek hanya untuk riya' maka sedekahnya dianggap salah dan sebagai tindakan yang tidak berakhlakul karimah.⁸

Islam mengajarkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang mulia itu haruslah berlandaskan ajaran islam baik itu dalam hal bisnis ataupun kegiatan sosial ekonomi yang sifatnya relawan. Beberapa prinsip menurut islam yang harus ditanamkan dalam diri setiap individu adalah sebagai berikut :

1. Selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas

Dalam melakukan kegiatan distribusi hendaknya berniat untuk tidak mengejar keuntungan semata, akan tetapi harus tetap mengharap keberkahan dari Allah SWT. Melakukan pekerjaan dengan ikhlas dan tidak mengeluh, selalu bersemangat dalam bekerja.⁹

2. Bertanggungjawab dalam menjalankan tugas

Tanggungjawab diartikan dengan berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Dalam menjalankan kegiatan apapun, tanggungjawab perlu diterapkan diri sendiri maupun mitra yang harus dihormati hak dan kewajibannya. Islam tidak pernah mentolerir pelanggaran atas hak dan kewajibannya itu sehingga

⁸ M. Dawan Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1990), 98.

⁹ Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 139.

disinilah yang harus di pikul manusia. Bertanggungjawab atas amanah yang diberikan merupakan ciri bagi muslim yang bertaqwa. Amanah adalah titipan yang menjadi tanggungan, bentuk kewajiban atau utang yang harus kita bayar dengan cara melunasinya sehingga kita merasa aman atau terbebas dari segala tuntutan.¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-An'am: 164.

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (174)

*Artinya: Katakanlah: “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanlah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”.*¹¹

3. Adil, dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang di dalam Islam.

Keadilan pada umumnya adalah keadaan atau situasi dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama. Dengan demikian

¹⁰ Ibid., 140.

¹¹ QS. Al- An'am (6): 164.

berarti bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹² Berbuat adil berarti menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sebaliknya berbuat tidak adil berarti menginjak-injak harkat dan martabat manusia. Keadilan dalam menyalurkan dana ZIS merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.¹³ Adil dalam arti melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan jujur, sederajat, dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang, lebih-lebih yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum. Dalam beraktivitas di dunia kerja baik itu bisnis maupun lembaga sosial, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karena orang yang adil akan

12 Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, 140.

13 Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 77.

lebih dekat dengan ketakwaan.¹⁴ Allah berfirman dalam QS. Al-Isra' : 8 sebagai berikut:

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْجِعَكُمْ ۖ وَإِن عُدتُم عُدتنا وَجَعْنَا
جَدًّا لَكُمْ لِّلْكُفْرِ إِن حَصِيحًّا رَّا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁵

Selain itu juga telah dijelaskan dalam QS. An-Nahl: 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
(وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠)

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

B. Dana Bergulir

14 Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 91.

15 QS. Al-Isra' (17): 8.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana bergulir berasal dari kata *dana* yang merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan sedang bergulir berasal kata *gulir* yang mendapat imbuhan *ber-* sehingga menjadi bergulir yang dimaksudkan disini akan digulirkan. Sehingga dana bergulir merupakan uang yang sengaja disediakan untuk dipinjamkan yang nanti kalau tujuan dari peminjaman telah terpenuhi akan dikembalikan dan akan digulirkan kepada yang lain, yang juga membutuhkan.¹⁶

Sedangkan menurut Undang-Undang atau Peraturan yang berlaku, dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dana bergulir yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/ daerah.
Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD) dan luar APBN/ APBD, misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/ atau diterima atas nama pemerintah/ pemerintah daerah.
2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi

¹⁶ Yufid, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, Digital.

¹⁷ Binsar H. Simanjuntak, dkk, *Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 "Akuntansi Dana Bergulir"*, (Jakarta: KSAP, 2008), 10- 11.

anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN- P atau APBD Perubahan).

3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Pengertian dikuasai dan/ atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dasar dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.
4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir. Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Kementerian Negara/ Lembaga baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.¹⁸

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses yang *relative* terus berjalan untuk meningkatkan perubahan kearah yang lebih baik. Pemberdayaan bisa disebut juga pengembangan.¹⁹ Secara *etimologi* pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti upaya, usaha, akal, kemampuan.²⁰

¹⁸Ibid., 10- 11.

¹⁹ Subandi Rukminto Adi, *Pemikiran- pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: UI Press, 2011), 32- 33.

²⁰ Badadu- Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), 317.

Jadi pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupa untuk mengembangkannya.²¹ Sementara secara terminologi istilah pengembangan masyarakat dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha bersama yang dilakukan oleh penduduk atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. *Community Development* menggambarkan makna yang penting dari dua konsep: *Community*, bermakna kualitas hubungan sosial dan *Development*, perubahan kearah kemajuan yang terencana.²² Menurut Shardlow sebagaimana yang dikutip oleh Isbandi, melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya mebalas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan dengan sesuai keinginan mereka.²³

2. Proses Pemberdayaan

Dalam pengembangan masyarakat proses merupakan hal yang penting. Sebagai proses pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakat dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti ini pemberdayaan dapat diartikan

21 Mubyartanto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 263.

22 Ferdian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Buku Obor, 2014), 30.

23 Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta: FE- UI, 2001), 33.

sebagai proses terencana guna meningkatkan skala utilitas dari objek yang diberdayakan.²⁴

Hogan (2000) seperti yang dikutip oleh Adi menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari 5 (lima) tahapan utama, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan ketidakberdayaan
- c. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek
- d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna
- e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikan

Dari pernyataan di atas tergambar mengapa Hogan, menyakini bahwa proses pemberdayaan yang terjadi pada tingkat individu tidak berhenti pada titik suatu tertentu, tetapi lebih merupakan sebagai upaya berkesinambungan untuk meningkatkan daya yang ada.

3. Tahapan-tahapan Pemberdayaan

Isbandi Rukminto Adi dengan rumusan strateginya yang menjadikan beberapa tahap dalam melakukan pemberdayaan yakni:²⁵

- a. Tahap Persiapan (*engagement*), tahap persiapan ini memiliki substansi penekanan pada dua hal elemen penting yakni penyiapan petugas dan penyiapan lapangan.
- b. Tahap Pengkajian (*assessment*), sebuah tahapan yang telah terlibat aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan karena masyarakat setempat yang sangat mengetahui keadaan dan masalah ditempat mereka berada.

24 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 61.

25 Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 2003), 58- 60.

- c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan (*designing*).
Dalam tahap ini program perencanaan dibahas secara maksimal dengan melibatkan peserta aktif dari pihak masyarakat guna memikirkan solusi atau pemecahan atas masalah yang mereka hadapi di wilayahnya.
- d. Tahap Performulasian Rencana Aksi (*designing*), pada tahap masyarakat dan fasilitator menjadi bagian penting dalam bekerjasama secara optimal.
- e. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan Implementasi, tahap ini merupakan bentuk pelaksanaan serta penerapan program yang telah dirumuskan sebelumnya bersama para masyarakat. Tahapan ini berisi tindakan aktualisasi bersinergi antara masyarakat dengan petugas pemberdayaan.
- f. Tahap Evaluasi, tahapan yang memiliki substansi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan dengan melibatkan warga. Tahap ini juga akan merumuskan berbagai indikator keberhasilan suatu program yang telah diimplementasikan serta dilakukan pula bentuk-bentuk stabilisasi terhadap perubahan atau kebiasaan baru yang diharapkan terjadi.
- g. Tahap terminasi (*disengagement*), sebuah tahapan dimana seluruh program telah berjalan secara optimal dan petugas fasilitator pemberdayaan masyarakat sudah akan mengakhiri kerjanya.

Dari pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud pemberdayaan adalah suatu upaya pergerakan dalam penguatan sosial agar masyarakat yang awalnya lemah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dapat diberdayakan dengan mendorong, memotifasi serta

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya hingga mereka mandiri.

4. Ekonomi

Menurut para ahli, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah dan *nomos* berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga rakyat maupun dalam rumah tangga negara. Jadi ekonomi merupakan suatu tata cara aturan yang ada dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap alat pemenuh kebutuhannya yang bersifat langka. Cara yang dimaksud disini berkaitan dengan aktivitas orang dan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi jasa-jasa dan barang-barang.²⁶

5. Masyarakat

Merujuk pada Ron Shaffer, Steve Deller dan Dave Marcouiller bahwa sebagian besar definisi yang ada tentang masyarakat merujuk pada area, kumpulan dan sosial ekonomi interaksi. Maka definisi masyarakat adalah sekelompok orang yang secara keberadaan fisik dibatasi dengan geografis, politik sosial dan ekonomi serta dengan hubungan komunikasi yang intens.²⁷

6. Cakupan pemberdayaan ekonomi masyarakat

²⁶ Asep Usman Ismail, *Pengamalan Al- qur'an tentang Pemberdayaan Dhuafa*, (Jakarta: Dakwah Press, 2008), 221.

²⁷ Ibid., 222.

Michael Sheraden mengatakan pemberdayaan ekonomi masyarakat setidaknya mencakup tiga bidang pemberdayaan yaitu:²⁸

Pertama, aset manusia (*human asset*) berkaitan erat pada pemberdayaan kualitas sumber daya manusianya. *Human capital* ini termasuk pada golongan aset tidak nyata, yang meliputi intelegensia, latar belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dsb. Usaha-usaha untuk meningkatkan *human asset* ini biasanya dilakukan dengan berbagai program yang bersifat kualitatif seperti program pelatihan dan keterampilan dalam bentuk kursus-kursus, penyuluhan, yang semuanya bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang pada akhirnya menghasilkan output pada peningkatan kualitas SDM.

Kedua, pemberdayaan aset modal keuangan (*finansial asset*), meliputi modal produksi yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin produksi, dan komponen produksilainnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi para pelaku perekonomian adalah sulitnya mendapatkan modal untuk kredit usaha. Ketidakmampuan dan ketidakpastian mereka dalam memenuhi setiap persyaratan yang diajukan oleh lembaga keuangan formal seperti bank menjadikan sulitnya dana usaha terealisasikan. Para pengusaha kecil pada umumnya tidak memiliki aset yang cukup untuk menjaminkan kepada pihak bank.

Ketiga, pemberdayaan aset sosial (*sosial asset*). Aset sosial meliputi keluarga, teman, koneksi atau jaringan sosial dalam bentuk dukungan emosional, informasi dan akses yang lebih mudah pada pekerjaan, kredit dan tipe aset lainnya.

²⁸ Ismet Firdaus dan Ahmad Zaky, *Upaya Meningkatkan Equity Perempuan Dhuafa Desa Bojong Indah, Parung*, (Jakarta: Dakwah Press, 2008), 226.

7. Indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan 8 indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Kedelapan indikator tersebut adalah sebagai berikut :²⁹

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, tempat hiburan, dll. Tingkat mobilitas ini di anggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan individu maupun keluarga sehari-hari. Seorang dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri.
- c. Kemampuannya membeli komoditas besar: kemampuan individu membeli komoditas atau barang- barang sekunder atau tersier, seperti TV, berlangganan koran dll.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama pasangan mengenai keputusan-keputusan keluarga.
- e. Kebebasan relatif dari komoditas keluarga
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang anggota DPRD setempat, mengetahui pentingnya memiliki akta nikah
- g. Keterlibatan dalamkampanye dan protes-protes yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, memiliki rumah, tanah, aset produktif.

²⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 64- 66

8. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk mendukung keterjaminan, kesempatan dan keberdayaan melalui:³⁰

- a. Pengembangan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial
- b. Penguatan akuntabilitas dan inklusifitas kelompok- kelompok masyarakat
- c. Peningkatan partisipasi berbasis luas
- d. Perluasan akses masyarakat terhadap informasi dan jaringan sosial
- e. Penyempurnaan pemerintah, lembaga dan kebijakan pada skala sosial dan nasional sehingga responsive terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Adapun target pengembangan masyarakat/ peningkatan kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan atau *empowerment* agar anggota masyarakat terlibat dalam proses produktif yang didasarkan pada kesetaraan atau *equity*, keterjaminan dan *security*, keberlangsungan atau *sustainability*, dan kerjasama atau *cooperation*, bila pemberdayaan atau kesetaraan, keterjaminan, keberlangsungan dan kerjasama dapat berjalan secara simultan maka sasaran kesejahteraan dapat tercapai.³¹

Jadi inti pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah mengarahkan dan mendorong perubahan struktural yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, pelaku ekonomi masyarakat mampu menikmati yang dihasilkannya dan seterusnya mampu menghasilkn dan bermanfaat serta berkelanjutan.

³⁰ Ibid., 2.

³¹ Asep Usman Ismail Dkk, *Pengembangan Komunitas Muslim; pemberdayaan Masyarakat kampung Badak Putih dan Kampung Satu Duit*, (Jakarta: Dakwah Press, 2007), 54.

